



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN KODE REKENING

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2015 telah ditetapkan Susunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur pada Struktur Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 77 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan pada kode rekening, yang meliputi kode urusan pemerintahan dan kode organisasi, penambahan kode objek pada jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta penambahan kode rincian objek pada objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Susunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KODE
REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Kode Urusan Pemerintah Daerah adalah suatu simbol berupa angka yang diberikan sebagai penanda untuk setiap urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Kode Perangkat Daerah adalah suatu simbol berupa angka yang diberikan sebagai penanda untuk setiap perangkat daerah yang melakukan urusan pemerintahan di daerah.
17. Kode Akun Pendapatan adalah suatu simbol berupa angka yang diberikan sebagai penanda untuk setiap akun pendapatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
18. Kode Akun Belanja adalah suatu simbol berupa angka yang diberikan sebagai penanda untuk setiap akun belanja yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
19. Kode Akun Pembiayaan adalah suatu simbol berupa angka yang diberikan sebagai penanda untuk setiap akun pembiayaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah melakukan pengelompokan urusan, Perangkat Daerah dan akun untuk memudahkan penyusunan APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi acuan dalam pengisian APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kode yang diberikan untuk setiap urusan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang tercantum dalam APBD.
- b. Kode Akun Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kode yang digunakan untuk mengklasifikasi pendapatan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.
- c. Kode Akun Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kode yang digunakan untuk mengklasifikasi belanja yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
- d. Kode Akun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kode yang digunakan untuk mengklasifikasi pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Kode Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kode Akun Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kode Akun Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kode Akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Susunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 APRIL 2018

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 10


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH
1 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 1


1 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I. : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TANGGAL : 9 APRIL 2018

**KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PERANGKAT DAERAH
1.					URUSAN WAJIB
1.	01.				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.	01.	01.			PENDIDIKAN
1.	01.	01.	01.		Dinas Pendidikan
1.	01.	02.			KESEHATAN
1.	01.	02.	01.		Dinas Kesehatan
1.	01.	02.	02.		RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
1.	01.	03.			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	01.	03.	01.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	01.	04.			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.	01.	04.	01.		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.	01.	05.			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.	01.	05.	01.		Satuan Polisi Pamong Praja
1.	01.	06.			SOSIAL
1.	01.	06.	01.		Dinas Sosial
1.	02.				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1.	02.	01.			TENAGA KERJA
1.	02.	01.	01.		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.	02.	02.			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	02.	02.	01.		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.	02.	03.			PANGAN
1.	02.	03.	01.		Dinas Ketahanan Pangan
1.	02.	04.			PERTANAHAN
1.	02.	05.			LINGKUNGAN HIDUP
1.	02.	05.	01.		Dinas Lingkungan Hidup
1.	02.	06.			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PERANGKAT DAERAH
1.	02.	07.			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.	02.	07.	01.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.	02.	08.			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	02.	09.			PERHUBUNGAN
1.	02.	09.	01.		Dinas Perhubungan
1.	02.	10.			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	02.	10.	01.		Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	02.	11.			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	02.	11.	01.		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.	02.	12.			PENANAMAN MODAL
1.	02.	12.	01.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	02.	13.			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.	02.	13.	01.		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.	02.	14.			STATISTIK
1.	02.	15.			PERSANDIAN
1.	02.	16.			KEBUDAYAAN
1.	02.	16.	01.		Dinas Kebudayaan
1.	02.	17.			PERPUSTAKAAN
1.	02.	17.	01.		Dinas Perpustakaan
1.	02.	18.			KEARSIPAN
1.	02.	18.	01.		Dinas Kearsipan
2.					URUSAN PILIHAN
2.	00.				URUSAN PILIHAN
2.	00.	01.			KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	00.	01.	01.		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	00.	02.			PARIWISATA
2.	00.	02.	01.		Dinas Pariwisata
2.	00.	03.			PERTANIAN
2.	00.	03.	01.		Dinas Pertanian
2.	00.	03.	02.		Dinas Peternakan

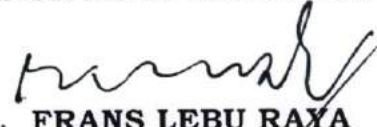
f

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PERANGKAT DAERAH
2.	00.	04.			KEHUTANAN
2.	00.	04.	01.		Dinas Kehutanan
2.	00.	05.			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	00.	05.	01.		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	00.	06.			PERDAGANGAN
2.	00.	06.	01.		Dinas Perdagangan
2.	00.	07.			INDUSTRI
2.	00.	07.	01.		Dinas Perindustrian
2.	00.	08.			TRANSMIGRASI
3.					PENUNJANG URUSAN
3.	00.				PENUNJANG URUSAN
3.	00.	01.			PENGAWASAN
3.	00.	01.	01.		Inspektorat Daerah
3.	00.	02.			PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.	00.	02.	01.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	00.	03.			KEUANGAN
3.	00.	03.	00.		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
3.	00.	03.	01.		Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	00.	04.			KEPEGAWAIAN
3.	00.	04.	01.		Badan Kepegawaian Daerah
3.	00.	05.			PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
3.	00.	05.	01.		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3.	00.	06.			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	00.	06.	01.		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	00.	07.			KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN
3.	00.	07.	01.		Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
3.	00.	08.			PERBATASAN
3.	00.	08.	01.		Badan Pengelola Perbatasan
3.	00.	09.			KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
3.	00.	09.	01.		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

1

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PERANGKAT DAERAH
4.					PENDUKUNG URUSAN
4.	00.				PENDUKUNG URUSAN
4.	00.	01.			SEKRETARIAT DAERAH
4.	00.	01.	01.		Sekretariat Daerah
4.	00.	01.	01.	01.	Biro Umum
4.	00.	01.	01.	02.	Biro Hukum
4.	00.	01.	01.	03.	Biro Organisasi
4.	00.	01.	01.	04.	Biro Perekonomian
4.	00.	01.	01.	05.	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.	00.	01.	01.	06.	Biro Pemerintahan
4.	00.	01.	01.	07.	Biro Hubungan Masyarakat
4.	00.	01.	01.	08.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.	00.	01.	01.	09.	Biro Kerjasama
4.	00.	02.			SEKRETARIAT DPRD
4.	00.	02.	01.		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	00.	03.			KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
4.	00.	03.	01.		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.	00.	04.			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.	00.	04.	01.		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.					KEWILAYAHAN
5.	00.				KEWILAYAHAN
6.					URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SERTA
6.	01.				URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	01.	01.			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	01.	01.	01.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	02.				URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA
6.	02.	01.			PENANGGULANGAN BENCANA
6.	02.	01.	01.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

KODE AKUN PENDAPATAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
4.					PENDAPATAN DAERAH
4.	1.				PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.	1.	1.			HASIL PAJAK DAERAH
4.	1.	1.	01.		Pajak Kendaraan Bermotor
4.	1.	1.	01.	01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)
4.	1.	1.	01.	02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)
4.	1.	1.	01.	03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)
4.	1.	1.	01.	04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)
4.	1.	1.	01.	05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)
4.	1.	1.	01.	06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)
4.	1.	1.	01.	07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)
4.	1.	1.	01.	08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)
4.	1.	1.	01.	09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)
4.	1.	1.	01.	10.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum)
4.	1.	1.	01.	11.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Umum)
4.	1.	1.	01.	12.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)
4.	1.	1.	01.	13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)
4.	1.	1.	01.	14.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Umum)
4.	1.	1.	01.	15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)
4.	1.	1.	02.		Pajak Kendaraan di Air
4.	1.	1.	02.	01.	Pajak Kendaraan di Air
4.	1.	1.	03.		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.	1.	1.	03.	01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)
4.	1.	1.	03.	02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)
4.	1.	1.	03.	03.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)
4.	1.	1.	03.	04.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)
4.	1.	1.	03.	05.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)
4.	1.	1.	03.	06.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)
4.	1.	1.	03.	07.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)
4.	1.	1.	03.	08.	D-2 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor)

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
4.	1.	1.	03.	09.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)
4.	1.	1.	03.	10.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)
4.	1.	1.	03.	11.	C-1 Truck, Pick Up, Light Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)
4.	1.	1.	03.	12.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)
4.	1.	1.	03.	13.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)
4.	1.	1.	04.		Bea Balik Nama Kendaraan di Air
4.	1.	1.	04.	01.	Bea Balik Nama Pajak Kendaraan di Air
4.	1.	1.	05.		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	1.	1.	05.	01.	Pajak Bahan Bakar Premium
4.	1.	1.	05.	02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina
4.	1.	1.	05.	03.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus
4.	1.	1.	05.	04.	Pajak Bahan Bakar Solar
4.	1.	1.	05.	05.	Pajak Bahan Bakar Gas
4.	1.	1.	06.		Pajak Air Permukaan
4.	1.	1.	06.	01.	Pajak Air Permukaan
4.	1.	1.	07.		Pajak Rokok
4.	1.	1.	07.	01.	Pajak Rokok.
4.	1.	1.	11.		Tunggakan Pajak
4.	1.	1.	11.	01.	Tunggakan Pajak
4.	1.	2.			HASIL RETRIBUSI DAERAH
4.	1.	2.	01.		Retribusi Jasa Umum
4.	1.	2.	01.	01.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.	1.	2.	01.	02.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.	1.	2.	01.	03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.	1.	2.	01.	04.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.	1.	2.	02.		Retribusi Jasa Usaha
4.	1.	2.	02.	01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.	1.	2.	02.	02.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahaan/Villa
4.	1.	2.	02.	03.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.	1.	2.	02.	04.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.	1.	2.	02.	05.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.	1.	2.	02.	06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.	1.	2.	02.	07.	Retribusi Pelayanan Alsintan
4.	1.	2.	03.		Retribusi Perizinan Tertentu
4.	1.	2.	03.	01.	Retribusi Izin Trayek

f

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
4.	1.	3.			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
4.	1.	3.	01.		Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.	1.	3.	01.	01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Flobamor
4.	1.	3.	01.	02.	Bagian Laba (Deviden) PT. Sasando International Hotel
4.	1.	3.	01.	03.	Bagian Laba (Deviden) PT. JAMKRIDA
4.	1.	3.	02.		Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4.	1.	3.	02.	01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Semen Kupang
4.	1.	3.	03.		Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.	1.	3.	03.	01.	Bagian Laba (Deviden) PT. BANGUN ASKRIDA
4.	1.	3.	04.		Bagian Laba Lembaga Keuangan
4.	1.	3.	04.	01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Bank NTT
4.	1.	4.			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
4.	1.	4.	01.		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.	1.	4.	01.	01.	Hasil Penjualan Tanah
4.	1.	4.	01.	02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4.	1.	4.	01.	03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4.	1.	4.	01.	04.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4.	1.	4.	01.	05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4.	1.	4.	01.	06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.	1.	4.	02.		Penerimaan Jasa Giro
4.	1.	4.	02.	01.	Jasa Giro Kas Daerah
4.	1.	4.	02.	02.	Jasa Giro Bendahara
4.	1.	4.	02.	03.	Jasa Giro Dana Cadangan
4.	1.	4.	03.		Pendapatan Bunga
4.	1.	4.	03.	01.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank
4.	1.	4.	03.	02.	Pendapatan Bunga Deposito Dana Cadangan
4.	1.	4.	03.	03.	Pendapatan Bunga Dana Untuk Kredit Kendaraan
4.	1.	4.	03.	04.	Pendapatan Bunga Investasi Non Permanen LUEP (Pertanian, Peternakan dan BKP2)
4.	1.	4.	03.	05.	Pendapatan Bunga pemberian pinjaman kepada Kelompok Masyarakat/dunia usaha (Koperasi)
4.	1.	4.	04.		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.	1.	4.	04.	01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
4.	1.	4.	04.	02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
4.	1.	4.	04.	03.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pihak Ketiga
4.	1.	4.	05.		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.	1.	4.	05.	01.	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4.	1.	4.	05.	02.	Penerimaan Potongan
4.	1.	4.	05.	03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.	1.	4.	06.		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.	1.	4.	06.	01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
4.	1.	4.	07.		Pendapatan Denda Pajak
4.	1.	4.	07.	01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4.	1.	4.	07.	02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.	1.	4.	07.	03.	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	1.	4.	07.	04.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4.	1.	4.	07.	05.	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4.	1.	4.	08.		Pendapatan Denda Retribusi
4.	1.	4.	08.	01.	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.	1.	4.	08.	02.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.	1.	4.	08.	03.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.	1.	4.	08.	04.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.	1.	4.	08.	05.	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.	1.	4.	08.	06.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahaan/ Villa
4.	1.	4.	08.	07.	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.	1.	4.	08.	08.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.	1.	4.	08.	09.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.	1.	4.	08.	10.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.	1.	4.	08.	11.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Alsintan
4.	1.	4.	08.	12.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek
4.	1.	4.	09.		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah
4.	1.	4.	09.	01.	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4.	1.	4.	09.	02.	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4.	1.	4.	09.	03.	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4.	1.	4.	09.	04.	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna
4.	1.	4.	10.		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4.	1.	4.	10.	01.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda.
4.	1.	4.	11.		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4.	1.	4.	11.	01.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

f

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
4.	1.	4.	11.	02.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pembongkaran Reklame
4.	1.	4.	11.	03.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4.	1.	4.	12.		Pendapatan dari Pengembalian
4.	1.	4.	12.	01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.	1.	4.	12.	02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4.	1.	4.	12.	03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.	1.	4.	12.	04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.	1.	4.	12.	05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.	1.	4.	12.	06.	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan Instruktur
4.	1.	4.	12.	07.	Pendapatan dari Pengembalian Dana Pendidikan
4.	1.	4.	12.	08.	Pendapatan dari Pengembalian Kekurangan Pekerjaan
4.	1.	4.	12.	09.	Pendapatan dari Pengembalian Sisa Kas Bendahara Pengeluaran SKPD
4.	1.	4.	12.	10.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS
4.	1.	4.	13.		Pendapatan Penyelenggaraan Diklat dan Sekolah
4.	1.	4.	13.	01.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat.
4.	1.	4.	13.	02.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4.	1.	4.	14.		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.	1.	4.	14.	01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Tanah
4.	1.	4.	14.	02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Gedung dan Bangunan
4.	1.	4.	14.	03.	Angsuran/Cicilan Penjualan Peralatan dan Mesin
4.	1.	4.	14.	04.	Angsuran/Cicilan Penjualan Jaringan
4.	1.	4.	14.	05.	Angsuran/Cicilan Penjualan Aset Tetap Lainnya
4.	1.	4.	15.		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4.	1.	4.	15.	01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah)
4.	1.	4.	15.	02.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
4.	1.	4.	15.	03.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah
4.	1.	4.	15.	04.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
4.	1.	4.	16.		Pendapatan BLUD
4.	1.	4.	16.	01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4.	1.	4.	16.	02.	Pendapatan Hibah BLUD
4.	1.	4.	16.	03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4.	1.	4.	17.		Pendapatan Dari Penyisihan Piutang
4.	1.	4.	17.	01.	Pendapatan dari Penyisihan Piutang Daerah
4.	1.	4.	17.	02.	Penerimaan dari Penneng PKB
4.	1.	4.	17.	03.	Penerimaan dari Pelayanan Perijinan

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
4.	1.	4.	18.		Lain Lain PAD yang Sah
4.	1.	4.	18.	01.	Lain Lain PAD yang Sah.
4.	2.				DANA PERIMBANGAN
4.	2.	1.			BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK
4.	2.	1.	01.		Bagi Hasil Pajak
4.	2.	1.	01.	01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.	2.	1.	01.	02.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21)
4.	2.	1.	01.	03.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau
4.	2.	1.	02.		Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
4.	2.	1.	02.	01.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan
4.	2.	1.	02.	02.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi
4.	2.	1.	02.	03.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara
4.	2.	2.			DANA ALOKASI UMUM
4.	2.	2.	01.		Dana Alokasi Umum (DAU)
4.	2.	2.	01.	01.	Dana Alokasi Umum
4.	2.	3.			DANA ALOKASI KHUSUS
4.	2.	3.	01.		Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4.	2.	3.	01.	01.	DAK Reguler
4.	2.	3.	01.	02.	DAK Penugasan
4.	2.	3.	01.	03.	DAK Afirmasi
4.	2.	3.	02.		Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4.	2.	3.	02.	01.	Bantuan Operasional Sekolah
4.	2.	3.	02.	02.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)
4.	2.	3.	02.	03.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD)
4.	2.	3.	02.	04.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD)
4.	2.	3.	02.	05.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4.	2.	3.	02.	06.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
4.	2.	3.	02.	07.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

f

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
4.	3.				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.	3.	1.			PENDAPATAN HIBAH
4.	3.	1.	01.		Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.	3.	1.	01.	01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.	3.	1.	02.		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.	3.	1.	02.	01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.	3.	1.	03.		Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri
4.	3.	1.	03.	01.	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
4.	3.	1.	04.		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan
4.	3.	1.	04.	01.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat.
4.	3.	1.	04.	02.	Pendapatan Hibah dari Perorangan
4.	3.	1.	05.		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.	3.	1.	05.	01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.	3.	1.	05.	02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.	3.	1.	05.	03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.	3.	2.			DANA DARURAT
4.	3.	2.	01.		Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.	3.	2.	01.	01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.	3.	2.	01.	02.	Dana Pasca Bencana Alam dan Kerusakan Sosial
4.	3.	3.			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI ¹⁾
4.	3.	3.	01.		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.	3.	3.	01.	01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.	3.	3.	01.	02.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
4.	3.	3.	01.	03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.	3.	3.	01.	04.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4.	3.	3.	01.	05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	3.	3.	01.	06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.	3.	3.	01.	07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.	3.	3.	02.		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ²⁾
4.	3.	3.	02.	01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

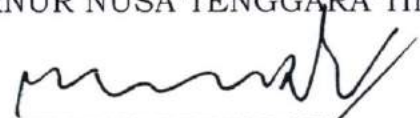
KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
4.	3.	3.	03.		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ²⁾
4.	3.	3.	03.	01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.	3.	3.	04.		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota ²⁾
4.	3.	3.	04.	01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.	3.	4.			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
4.	3.	4.	01.		Dana Penyesuaian
4.	3.	4.	01.	01.	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4.	3.	4.	01.	02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4.	3.	4.	01.	03.	Dana Insentif Daerah
4.	3.	4.	01.	04.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi
4.	3.	4.	01.	05.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4.	3.	4.	02.		Dana Otonomi Khusus
4.	3.	4.	02.	01.	Dana Otonomi Khusus.
4.	3.	4.	02.	02.	Dana Tambahan Infrastruktur
4.	3.	5.			BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
4.	3.	5.	01.		Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.	3.	5.	01.	01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ...
4.	3.	5.	02.		Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.	3.	5.	02.	01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.....
4.	3.	5.	03.		Bantuan Keuangan dari Kota
4.	3.	5.	03.	01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4.	3.	6.			PENERIMAAN DARI PIHAK KETIGA
4.	3.	6.	01.		Sumbangan Pihak Ketiga
4.	3.	6.	01.	01.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
4.	3.	6.	02.		Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
4.	3.	6.	02.	01.	Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Keterangan :

- 1) Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2) Dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III. : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TANGGAL : 9 APRIL 2018

**KODE AKUN BELANJA
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.					BELANJA DAERAH
5.	1.				BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.	1.	1.			BELANJA PEGAWAI
5.	1.	1.	01.		Gaji dan Tunjangan
5.	1.	1.	01.	01.	Gaji Pokok PNS
5.	1.	1.	01.	02.	Tunjangan Keluarga
5.	1.	1.	01.	03.	Tunjangan Jabatan Struktural
5.	1.	1.	01.	04.	Tunjangan Fungsional
5.	1.	1.	01.	05.	Tunjangan Umum
5.	1.	1.	01.	06.	Tunjangan Beras
5.	1.	1.	01.	07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.	1.	1.	01.	08.	Pembulatan Gaji
5.	1.	1.	01.	09.	Iuran Jaminan Kesehatan
5.	1.	1.	01.	10.	Uang Paket
5.	1.	1.	01.	11.	Tunjangan Badan Musyawarah
5.	1.	1.	01.	12.	Tunjangan Komisi
5.	1.	1.	01.	13.	Tunjangan Badan Anggaran
5.	1.	1.	01.	14.	Tunjangan Badan Kehormatan
5.	1.	1.	01.	15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.	1.	1.	01.	16.	Tunjangan Perumahan
5.	1.	1.	01.	17.	Uang Duka Wafat / Tewas
5.	1.	1.	01.	18.	Uang Jasa Pengabdian
5.	1.	1.	01.	20.	Tunjangan Badan Legislasi
5.	1.	1.	01.	21.	Tunjangan Kesehatan DPRD
5.	1.	1.	01.	22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan
5.	1.	1.	01.	23.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5.	1.	1.	01.	24.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5.	1.	1.	01.	25.	Tunjangan Transportasi DPRD
5.	1.	1.	01.	26.	Tunjangan Reses DPRD
5.	1.	1.	02.		Tambahan Penghasilan PNS
5.	1.	1.	02.	01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.	1.	1.	02.	02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	1.	1.	02.	03.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5.	1.	1.	02.	04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.	1.	1.	02.	05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
5.	1.	1.	02.	06.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5.	1.	1.	02.	07.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5.	1.	1.	02.	08.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5.	1.	1.	03.		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.	1.	1.	03.	01.	Dana Operasional Pimpinan DPRD
5.	1.	1.	03.	02.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.	1.	1.	03.	03.	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.	1.	1.	03.	04.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya KDH/WKDH
5.	1.	1.	04.		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5.	1.	1.	04.	01.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5.	1.	1.	04.	02.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5.	1.	1.	04.	03.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5.	1.	1.	05.		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.	1.	1.	05.	01.	Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5.	1.	1.	05.	02.	Biaya Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.	1.	1.	05.	03.	Insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.	1.	1.	05.	04.	Insentif Pemungutan Pajak Air Permukaan (AP)
5.	1.	1.	05.	05.	Insentif Pemungutan Pajak Rokok
5.	1.	1.	06.		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.	1.	1.	06.	01.	Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
5.	1.	1.	06.	02.	Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
5.	1.	1.	06.	03.	Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan
5.	1.	1.	06.	04.	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	1.	1.	06.	05.	Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.	1.	1.	06.	06.	Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahaan/Villa
5.	1.	1.	06.	07.	Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.	1.	1.	06.	08.	Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
5.	1.	1.	06.	09.	Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5.	1.	1.	06.	10.	Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir
5.	1.	1.	06.	11.	Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Alsintan
5.	1.	1.	06.	12.	Insentif Pemungutan Retribusi Izin Trayek

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	1.	2.			BELANJA BUNGA
5.	1.	2.	01.		Bunga Utang Pinjaman
5.	1.	2.	01.	01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.	1.	2.	01.	02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.	1.	2.	01.	03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.	1.	2.	01.	04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.	1.	2.	02.		Bunga Utang Obligasi
5.	1.	2.	02.	01.	Bunga Utang Obligasi
5.	1.	3.			BELANJA SUBSIDI
5.	1.	3.	01.		Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.	1.	3.	01.	01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan.....
5.	1.	3.	01.	02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga.....
5.	1.	4.			BELANJA HIBAH
5.	1.	4.	01.		Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.	1.	4.	01.	01.	Pemerintah Pusat
5.	1.	4.	01.	02.	Instansi Vertikal
5.	1.	4.	02.		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ³⁾
5.	1.	4.	02.	01.	Pemerintahan Provinsi
5.	1.	4.	02.	02.	Pemerintahan Kabupaten/Kota
5.	1.	4.	02.	03.	Pemerintahan Desa/Kelurahan
5.	1.	4.	03.		Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah / Lembaga Penjamin Kredit Daerah
5.	1.	4.	03.	01.	Perusahaan Daerah PT. Flobamor
5.	1.	4.	03.	02.	Perusahaan Daerah, Lembaga Penjamin Kredit Daerah
5.	1.	4.	04.		Belanja Hibah kepada Masyarakat
5.	1.	4.	04.	01.	Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian
5.	1.	4.	04.	02.	Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
5.	1.	4.	04.	03.	Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan
5.	1.	4.	04.	04.	Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan
5.	1.	4.	04.	05.	Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian
5.	1.	4.	04.	06.	Kelompok Masyarakat Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat
5.	1.	4.	04.	07.	Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	1.	4.	05.		Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
5.	1.	4.	05.	01.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian
5.	1.	4.	05.	02.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan
5.	1.	4.	05.	03.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
5.	1.	4.	05.	04.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan
5.	1.	4.	05.	05.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesenian
5.	1.	4.	05.	06.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat
5.	1.	4.	05.	07.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan
5.	1.	4.	05.	08.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.	1.	4.	05.	09.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi
5.	1.	4.	05.	10.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial
5.	1.	4.	06.		Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5.	1.	4.	06.	01.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar
5.	1.	4.	06.	02.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Menengah
5.	1.	4.	06.	03.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Tinggi
5.	1.	5.			BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.	1.	5.	01.		Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
5.	1.	5.	01.	01.	Yang Dapat direncanakan
5.	1.	5.	01.	02.	Yang Tidak Dapat direncanakan
5.	1.	5.	01.	03.	Belanja Bantuan Pendidikan
5.	1.	5.	02.		Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
5.	1.	5.	02.	01.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian
5.	1.	5.	02.	02.	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
5.	1.	5.	02.	03.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial
5.	1.	5.	02.	04.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan
5.	1.	5.	03.		Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah
5.	1.	5.	03.	01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan
5.	1.	5.	03.	02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan
5.	1.	5.	03.	03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Kesehatan

1

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	1.	6.			BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5.	1.	6.	01.		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.	1.	6.	01.	01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5.	1.	6.	02.		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.	1.	6.	02.	01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Kupang
5.	1.	6.	02.	02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kupang
5.	1.	6.	02.	03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sabu Raijua
5.	1.	6.	02.	04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rote Ndao
5.	1.	6.	02.	05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTS
5.	1.	6.	02.	06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTU
5.	1.	6.	02.	07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Belu
5.	1.	6.	02.	08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Alor
5.	1.	6.	02.	09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Flores Timur
5.	1.	6.	02.	10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lembata
5.	1.	6.	02.	11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sikka
5.	1.	6.	02.	12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ende
5.	1.	6.	02.	13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ngada
5.	1.	6.	02.	14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Nagekeo
5.	1.	6.	02.	15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai
5.	1.	6.	02.	16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Timur
5.	1.	6.	02.	17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Barat
5.	1.	6.	02.	18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Timur
5.	1.	6.	02.	19.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat
5.	1.	6.	02.	20.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat Daya
5.	1.	6.	02.	21.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Tengah
5.	1.	6.	02.	22.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Malaka
5.	1.	6.	03.		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.	1.	6.	03.	01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.	1.	6.	04.		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.	1.	6.	04.	01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kota Kupang
5.	1.	6.	04.	02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Kupang
5.	1.	6.	04.	03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sabu Raijua
5.	1.	6.	04.	04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Rote Ndao
5.	1.	6.	04.	05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten TTS
5.	1.	6.	04.	06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten TTU
5.	1.	6.	04.	07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Belu

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	1.	6.	04.	08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Alor
5.	1.	6.	04.	09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Flores Timur
5.	1.	6.	04.	10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Lembata
5.	1.	6.	04.	11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sikka
5.	1.	6.	04.	12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Ende
5.	1.	6.	04.	13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Ngada
5.	1.	6.	04.	14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Nagekeo
5.	1.	6.	04.	15.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Manggarai
5.	1.	6.	04.	16.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Timur
5.	1.	6.	04.	17.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Barat
5.	1.	6.	04.	18.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sumba Timur
5.	1.	6.	04.	19.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat
5.	1.	6.	04.	20.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat Daya
5.	1.	6.	04.	21.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Sumba Tengah
5.	1.	6.	04.	22.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Malaka
5.	1.	6.	05.		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.	1.	6.	05.	01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.	1.	7.			BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5.	1.	7.	01.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.	1.	7.	01.	01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi.....
5.	1.	7.	02.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.	1.	7.	02.	01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Kupang
5.	1.	7.	02.	02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kupang
5.	1.	7.	02.	03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sabu Raijua
5.	1.	7.	02.	04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rote Ndao
5.	1.	7.	02.	05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten TTS
5.	1.	7.	02.	06.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten TTU
5.	1.	7.	02.	07.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belu
5.	1.	7.	02.	08.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Alor
5.	1.	7.	02.	09.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Flores Timur
5.	1.	7.	02.	10.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Lembata
5.	1.	7.	02.	11.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sikka

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	1.	7.	02.	12.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Ende
5.	1.	7.	02.	13.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Ngada
5.	1.	7.	02.	14.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Nagekeo
5.	1.	7.	02.	15.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Manggarai
5.	1.	7.	02.	16.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Manggarai Timur
5.	1.	7.	02.	17.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Manggarai Barat
5.	1.	7.	02.	18.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sumba Timur
5.	1.	7.	02.	19.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sumba Barat
5.	1.	7.	02.	20.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sumba Barat Daya
5.	1.	7.	02.	21.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sumba Tengah
5.	1.	7.	02.	22.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Malaka
5.	1.	7.	03.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.	1.	7.	03.	01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Kupang
5.	1.	7.	03.	02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua
5.	1.	7.	03.	03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Rote Ndao
5.	1.	7.	03.	04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten TTS
5.	1.	7.	03.	05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten TTU
5.	1.	7.	03.	06.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Belu
5.	1.	7.	03.	07.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Alor
5.	1.	7.	03.	08.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Flores Timur
5.	1.	7.	03.	09.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Lembata
5.	1.	7.	03.	10.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sikka
5.	1.	7.	03.	11.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ende
5.	1.	7.	03.	12.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Ngada
5.	1.	7.	03.	13.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Nagekeo
5.	1.	7.	03.	14.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Manggarai
5.	1.	7.	03.	15.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Manggarai Timur
5.	1.	7.	03.	16.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Manggarai Barat
5.	1.	7.	03.	17.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sumba Timur
5.	1.	7.	03.	18.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sumba Barat
5.	1.	7.	03.	19.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya
5.	1.	7.	03.	20.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sumba Tengah
5.	1.	7.	03.	21.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Malaka

f

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	1.	7.	04.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya
5.	1.	7.	04.	01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...
5.	1.	7.	04.	02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.	1.	7.	04.	03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
5.	1.	7.	05.		Belanja Bantuan Partai Politik
5.	1.	7.	05.	01.	Belanja Bantuan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
5.	1.	7.	05.	02.	Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5.	1.	7.	05.	03.	Belanja Bantuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5.	1.	7.	05.	04.	Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.	1.	7.	05.	05.	Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	1.	7.	05.	06.	Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
5.	1.	7.	05.	07.	Belanja Bantuan Partai Demokrat
5.	1.	7.	05.	08.	Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)
5.	1.	7.	05.	09.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5.	1.	7.	05.	10.	Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
5.	1.	7.	05.	11.	Belanja Bantuan Partai Bulan Bintang (PBB)
5.	1.	7.	05.	12.	Belanja Bantuan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
5.	1.	8.			BELANJA TIDAK TERDUGA
5.	1.	8.	01.		Belanja Tidak Terduga.
5.	1.	8.	01.	01.	Belanja Tidak Terduga
5.	2.				BELANJA LANGSUNG
5.	2.	1.			BELANJA PEGAWAI
5.	2.	1.	01.		Honorarium PNS
5.	2.	1.	01.	01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.	2.	1.	01.	02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa
5.	2.	1.	01.	03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan
5.	2.	1.	01.	04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.	2.	1.	01.	05.	Honorarium Sopir
5.	2.	1.	01.	06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas
5.	2.	1.	01.	07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan
5.	2.	1.	01.	08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah
5.	2.	1.	01.	09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi
5.	2.	1.	02.		Honorarium Non PNS
5.	2.	1.	02.	01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	1.	02.	02.	Upah Kerja
5.	2.	1.	02.	03.	Honorarium Petugas Keamanan
5.	2.	1.	03.		Uang Lembur
5.	2.	1.	03.	01.	Uang Lembur Pegawai
5.	2.	1.	04.		Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.	2.	1.	04.	01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS SMA
5.	2.	1.	04.	02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS SMK
5.	2.	1.	04.	03.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS SLB
5.	2.	1.	06.		Belanja Pegawai BLUD
5.	2.	1.	06.	01.	Belanja Pegawai BLUD.
5.	2.	2.			BELANJA BARANG DAN JASA
5.	2.	2.	01.		Belanja Bahan Pakai Habis
5.	2.	2.	01.	01.	Belanja Alat Tulis Kantor
5.	2.	2.	01.	02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.	2.	2.	01.	03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5.	2.	2.	01.	04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.	2.	2.	01.	05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.	2.	2.	01.	06.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.	2.	2.	01.	07.	Belanja Pengisian Tabung Gas
5.	2.	2.	01.	08.	Belanja Peralatan Olahraga
5.	2.	2.	01.	09.	Belanja Tanda Penghargaan
5.	2.	2.	01.	10.	Belanja Bahan Pakai Habis Ruangan Rumah Sakit
5.	2.	2.	01.	11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
5.	2.	2.	01.	12.	Belanja Bahan Pakai Habis Reagensia
5.	2.	2.	01.	13.	Belanja Bahan Pakai Habis Haemodialisa
5.	2.	2.	01.	14.	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi
5.	2.	2.	02.		Belanja Bahan/Material
5.	2.	2.	02.	01.	Belanja Bahan Baku Bangunan
5.	2.	2.	02.	02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman
5.	2.	2.	02.	03.	Belanja Ternak/Bibit Ternak
5.	2.	2.	02.	04.	Belanja Bahan Obat-obatan
5.	2.	2.	02.	05.	Belanja Bahan Kimia
5.	2.	2.	02.	06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium
5.	2.	2.	02.	07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi
5.	2.	2.	02.	08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan
5.	2.	2.	02.	09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba
5.	2.	2.	02.	10.	Belanja Cinderamata / Souvenir
5.	2.	2.	02.	11.	Belanja Alat Bermain / Peraga

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	2.	02.	12.	Belanja Peralatan Pertanian
5.	2.	2.	02.	13.	Belanja Bahan Baku Tenunan
5.	2.	2.	02.	14.	Belanja Bahan Penunjang Perbengkelan
5.	2.	2.	02.	15.	Belanja Bahan Kompos
5.	2.	2.	02.	16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak
5.	2.	2.	02.	17.	Belanja Material Pembuatan Tanda-Tanda Peringatan Bahaya
5.	2.	2.	02.	18.	Belanja Bendera dan Umbul-umbul
5.	2.	2.	02.	19.	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5.	2.	2.	02.	20.	Belanja Pupuk
5.	2.	2.	03.		Belanja Jasa Kantor
5.	2.	2.	03.	01.	Belanja Telepon
5.	2.	2.	03.	02.	Belanja Air
5.	2.	2.	03.	03.	Belanja Listrik
5.	2.	2.	03.	04.	Belanja Jasa Penyusunan Website
5.	2.	2.	03.	05.	Belanja Surat Kabar/Majalah
5.	2.	2.	03.	06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5.	2.	2.	03.	07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan
5.	2.	2.	03.	08.	Belanja Sertifikasi
5.	2.	2.	03.	09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.	2.	2.	03.	10.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.	2.	2.	03.	11.	Belanja Jasa Kesenian
5.	2.	2.	03.	12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.	2.	2.	03.	13.	Belanja Dokumentasi
5.	2.	2.	03.	14.	Belanja Dekorasi
5.	2.	2.	03.	15.	Belanja Jasa Pemeriksaan
5.	2.	2.	03.	16.	Belanja Publikasi
5.	2.	2.	03.	17.	Belanja Jasa Penguburan Jenasah Tidak Mampu/Tidak Dikenal
5.	2.	2.	03.	18.	Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik
5.	2.	2.	03.	19.	Belanja Jasa Recording Ternak
5.	2.	2.	03.	20.	Belanja Jasa Rumah Pemotong Hewan
5.	2.	2.	03.	21.	Belanja Jasa Penyusunan Buku
5.	2.	2.	03.	22.	Belanja Jasa Jumpa PERS
5.	2.	2.	03.	23.	Belanja Jasa Tata Rias
5.	2.	2.	03.	24.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan PBB
5.	2.	2.	03.	25.	Belanja Jasa Pembersihan
5.	2.	2.	03.	26.	Belanja Jasa Pengganti Biaya Administrasi
5.	2.	2.	03.	27.	Belanja Jasa Kalibrasi
5.	2.	2.	03.	28.	Belanja Jasa Keamanan
5.	2.	2.	03.	29.	Belanja Jasa Angkut Bahan
5.	2.	2.	03.	30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator
5.	2.	2.	03.	31.	Belanja Jasa Pihak Ketiga

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	2.	03.	32.	Belanja Iuran
5.	2.	2.	03.	33.	Belanja Jasa Sopir
5.	2.	2.	03.	34.	Belanja Jasa Buruh
5.	2.	2.	03.	35.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5.	2.	2.	03.	36.	Belanja Jasa Langganan Parkir dan e-Card Tol
5.	2.	2.	03.	37.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
5.	2.	2.	04.		Belanja Premi Asuransi
5.	2.	2.	04.	01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.	2.	2.	04.	02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.	2.	2.	04.	03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
5.	2.	2.	04.	04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan
5.	2.	2.	05.		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.	2.	2.	05.	01.	Belanja Jasa Service
5.	2.	2.	05.	02.	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.	2.	2.	05.	03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.	2.	2.	05.	04.	Belanja Jasa KIR
5.	2.	2.	05.	05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.	2.	2.	05.	06.	Belanja Surat Ijin Mengemudi ¹⁾
5.	2.	2.	05.	07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.	2.	2.	05.	08.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.	2.	2.	06.		Belanja Cetak dan Penggandaan
5.	2.	2.	06.	01.	Belanja cetak
5.	2.	2.	06.	02.	Belanja Penggandaan
5.	2.	2.	06.	03.	Belanja Jilid
5.	2.	2.	07.		Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.	2.	2.	07.	01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
5.	2.	2.	07.	02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.	2.	2.	07.	03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
5.	2.	2.	07.	04.	Belanja Sewa Tempat Parkir / Tambat
5.	2.	2.	07.	05.	Belanja Sewa Laboratorium
5.	2.	2.	08.		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.	2.	2.	08.	01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.	2.	2.	08.	02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.	2.	2.	08.	03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.	2.	2.	09.		Belanja Sewa Alat Berat
5.	2.	2.	09.	01.	Belanja Sewa Eskavator

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	2.	09.	02.	Belanja Sewa Buldoser
5.	2.	2.	09.	03.	Belanja Sewa Stoom Wals
5.	2.	2.	10.		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.	2.	2.	10.	01.	Belanja Sewa Meja Kursi
5.	2.	2.	10.	02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer
5.	2.	2.	10.	03.	Belanja Sewa Proyektor
5.	2.	2.	10.	04.	Belanja Sewa Generator
5.	2.	2.	10.	05.	Belanja Sewa Tenda
5.	2.	2.	10.	06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5.	2.	2.	10.	07.	Belanja Sewa Panggung
5.	2.	2.	10.	08.	Belanja Sewa Alat Listrik
5.	2.	2.	10.	09.	Belanja Sewa Alat Musik
5.	2.	2.	10.	10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System
5.	2.	2.	10.	11.	Belanja Sewa Alat Komunikasi
5.	2.	2.	10.	12.	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga
5.	2.	2.	10.	13.	Belanja Sewa Peralatan Praktek/Pelatihan
5.	2.	2.	10.	14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba
5.	2.	2.	10.	15.	Belanja Sewa AC
5.	2.	2.	10.	16.	Belanja Sewa Jaringan Internet
5.	2.	2.	11.		Belanja Makanan dan Minuman
5.	2.	2.	11.	01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5.	2.	2.	11.	02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.	2.	2.	11.	03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5.	2.	2.	11.	04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.	2.	2.	11.	05.	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan Daerah
5.	2.	2.	11.	06.	Belanja Bahan Makanan
5.	2.	2.	11.	07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
5.	2.	2.	12.		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.	2.	2.	12.	01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.	2.	2.	12.	02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.	2.	2.	12.	03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.	2.	2.	12.	04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.	2.	2.	12.	05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.	2.	2.	12.	06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5.	2.	2.	13.		Belanja Pakaian Kerja
5.	2.	2.	13.	01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.	2.	2.	14.		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.	2.	2.	14.	01.	Belanja Pakaian KORPRI

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	2.	14.	02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
5.	2.	2.	14.	03.	Belanja Pakaian Olahraga
5.	2.	2.	14.	04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan
5.	2.	2.	15.		Belanja Perjalanan Dinas
5.	2.	2.	15.	01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.	2.	2.	15.	02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.	2.	2.	15.	03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
5.	2.	2.	16.		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.	2.	2.	16.	01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D ₃
5.	2.	2.	16.	02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S ₁
5.	2.	2.	16.	03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S ₂
5.	2.	2.	16.	04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S ₃
5.	2.	2.	16.	05.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN
5.	2.	2.	16.	06.	Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar PNS
5.	2.	2.	17.		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
5.	2.	2.	17.	01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan
5.	2.	2.	17.	02.	Belanja Sosialisasi
5.	2.	2.	17.	03.	Belanja Bimbingan Teknis
5.	2.	2.	17.	04.	Belanja Rapat ²⁾
5.	2.	2.	18.		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.	2.	2.	18.	01.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5.	2.	2.	18.	02.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5.	2.	2.	19.		Belanja Pemulangan Pegawai
5.	2.	2.	19.	01.	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
5.	2.	2.	19.	02.	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
5.	2.	2.	19.	03.	Biaya Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
5.	2.	2.	20.		Belanja Pemeliharaan
5.	2.	2.	20.	01.	Belanja Pemeliharaan Tanah
5.	2.	2.	20.	02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.	2.	2.	20.	03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.	2.	2.	20.	04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.	2.	2.	20.	05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.	2.	2.	21.		Belanja Jasa Konsultansi
5.	2.	2.	21.	01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.	2.	2.	21.	02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.	2.	2.	21.	03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	2.	21.	04.	Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan
5.	2.	2.	21.	05.	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Buku
5.	2.	2.	21.	06.	Belanja Jasa Kajian
5.	2.	2.	21.	07.	Belanja Jasa Konsultansi Jaringan
5.	2.	2.	22.		Belanja Pendidikan
5.	2.	2.	22.	01.	Belanja Pendidikan Bagi Anak Panti
5.	2.	2.	23.		Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.	2.	2.	23.	01.	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
5.	2.	2.	23.	02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
5.	2.	2.	24.		Belanja Hibah Barang dan Jasa
5.	2.	2.	24.	01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5.	2.	2.	24.	02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
5.	2.	2.	25.		Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa
5.	2.	2.	25.	01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5.	2.	2.	25.	02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
5.	2.	2.	26.		Belanja Penyelenggaraan Program Pemerintah
5.	2.	2.	26.	01.	Belanja Penyelenggaraan Program Desa Mandiri
5.	2.	2.	27.		Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.	2.	2.	27.	01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.
5.	2.	2.	28.		Belanja Operasional Manajemen Mutu
5.	2.	2.	28.	01.	Belanja Operasional Manajemen Mutu SMA
5.	2.	2.	28.	02.	Belanja Operasional Manajemen Mutu SMK
5.	2.	2.	28.	03.	Belanja Operasional Manajemen Mutu SLB
5.	2.	2.	29.		Belanja Barang Dana BOS
5.	2.	2.	29.	01.	Belanja Barang Dana BOS SMA
5.	2.	2.	29.	02.	Belanja Barang Dana BOS SMK
5.	2.	2.	29.	03.	Belanja Barang Dana BOS SLB
5.	2.	3.			BELANJA MODAL
5.	2.	3.	01.		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.	2.	3.	01.	01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	01.	02.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian
5.	2.	3.	01.	03.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5.	2.	3.	01.	04.	Belanja Modal Pengadaan Hutan
5.	2.	3.	01.	05.	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan/ Tambak
5.	2.	3.	01.	06.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor
5.	2.	3.	01.	07.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
5.	2.	3.	01.	08.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5.	2.	3.	01.	09.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5.	2.	3.	01.	10.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Sarana Industri
5.	2.	3.	01.	11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
5.	2.	3.	01.	12.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
5.	2.	3.	01.	13.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
5.	2.	3.	01.	14.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
5.	2.	3.	01.	15.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus
5.	2.	3.	01.	16.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
5.	2.	3.	01.	17.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
5.	2.	3.	01.	18.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal
5.	2.	3.	01.	19.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga
5.	2.	3.	01.	20.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Bandara/Lapangan Terbang Perintis
5.	2.	3.	01.	21.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
5.	2.	3.	01.	22.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
5.	2.	3.	01.	23.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar
5.	2.	3.	01.	24.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
5.	2.	3.	01.	25.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
5.	2.	3.	01.	26.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
5.	2.	3.	01.	27.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Ibadah
5.	2.	3.	01.	28.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Olah Raga
5.	2.	3.	01.	29.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan
5.	2.	3.	01.	30.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan
5.	2.	3.	01.	31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku

h

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	01.	32.	Belanja Modal Relokasi dan Pembebasan Tanah
5.	2.	3.	01.	33.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Area Promosi
5.	2.	3.	01.	34.	Belanja Modal Pengadaan Batas Tanah
5.	2.	3.	01.	35.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5.	2.	3.	01.	36.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5.	2.	3.	01.	37.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5.	2.	3.	01.	38.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5.	2.	3.	01.	39.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.	2.	3.	02.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.	2.	3.	02.	01.	Belanja Modal Pengadaan Traktor
5.	2.	3.	02.	02.	Belanja Modal Pengadaan Buldozer
5.	2.	3.	02.	03.	Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals
5.	2.	3.	02.	04.	Belanja Modal Pengadaan Eskavator
5.	2.	3.	02.	05.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk
5.	2.	3.	02.	06.	Belanja Modal Pengadaan Crane
5.	2.	3.	02.	07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan
5.	2.	3.	02.	08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen
5.	2.	3.	02.	09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
5.	2.	3.	02.	10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset Industri
5.	2.	3.	02.	11.	Belanja Modal Pengadaan Pompa
5.	2.	3.	02.	12.	Belanja Modal Pengadaan Grader
5.	2.	3.	02.	13.	Belanja Modal Pengadaan Pile Driver
5.	2.	3.	02.	14.	Belanja Modal Pengadaan Hauler
5.	2.	3.	02.	15.	Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment
5.	2.	3.	02.	16.	Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment
5.	2.	3.	02.	17.	Belanja Modal Pengadaan Aggregate dan Concrete Equipment
5.	2.	3.	02.	18.	Belanja Modal Pengadaan Loader
5.	2.	3.	02.	19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat
5.	2.	3.	02.	20.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik
5.	2.	3.	02.	21.	Belanja Modal Pengadaan Feeder
5.	2.	3.	02.	22.	Belanja Modal Pengadaan Compressor
5.	2.	3.	02.	23.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5.	2.	3.	02.	24.	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5.	2.	3.	02.	25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5.	2.	3.	02.	26.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5.	2.	3.	03.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Apung
5.	2.	3.	03.	01.	Belanja Modal Pengadaan Dredger
5.	2.	3.	03.	02.	Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	03.	03.	Belanja Modal Pengadaan Amphibi Dredger
5.	2.	3.	03.	04.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik
5.	2.	3.	03.	05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5.	2.	3.	04.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.	2.	3.	04.	01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
5.	2.	3.	04.	02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep
5.	2.	3.	04.	03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
5.	2.	3.	04.	04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus
5.	2.	3.	04.	05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
5.	2.	3.	04.	06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck
5.	2.	3.	04.	07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)
5.	2.	3.	04.	08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks
5.	2.	3.	04.	09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
5.	2.	3.	04.	10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance
5.	2.	3.	04.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran
5.	2.	3.	04.	12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
5.	2.	3.	04.	13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator
5.	2.	3.	04.	14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan
5.	2.	3.	04.	15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Unit Penerangan KB (MUPEN KB)
5.	2.	3.	04.	16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus
5.	2.	3.	05.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.	2.	3.	05.	01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak
5.	2.	3.	05.	02.	Belanja Modal Pengadaan Pedati / Delman / Dokar / Bendi/ Cidomo / Andong
5.	2.	3.	05.	03.	Belanja Modal Pengadaan Becak
5.	2.	3.	05.	04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda
5.	2.	3.	05.	05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	06.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.	2.	3.	06.	01.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor
5.	2.	3.	06.	02.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Feri
5.	2.	3.	06.	03.	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat
5.	2.	3.	06.	04.	Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel
5.	2.	3.	06.	05.	Belanja Modal Pengadaan Hydro Foil
5.	2.	3.	06.	06.	Belanja Modal Pengadaan Jet Foil
5.	2.	3.	06.	07.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tug Boat
5.	2.	3.	06.	08.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tanker
5.	2.	3.	06.	09.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Kargo
5.	2.	3.	07.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.	2.	3.	07.	01.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar
5.	2.	3.	07.	02.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan
5.	2.	3.	07.	03.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Tongkang
5.	2.	3.	07.	04.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet
5.	2.	3.	07.	05.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Rakit
5.	2.	3.	07.	06.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci
5.	2.	3.	07.	07.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Dayung
5.	2.	3.	08.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.	2.	3.	08.	01.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo
5.	2.	3.	08.	02.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang
5.	2.	3.	08.	03.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Helikopter
5.	2.	3.	08.	04.	Belanja Modal Pesawat Pemadam Kebakaran
5.	2.	3.	08.	05.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Capung
5.	2.	3.	08.	06.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi
5.	2.	3.	08.	07.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Layang
5.	2.	3.	09.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.	2.	3.	09.	01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
5.	2.	3.	09.	02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut
5.	2.	3.	09.	03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak
5.	2.	3.	09.	04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
5.	2.	3.	09.	05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator
5.	2.	3.	09.	06.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5.	2.	3.	09.	07.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5.	2.	3.	09.	08.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5.	2.	3.	09.	09.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5.	2.	3.	09.	10.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	09.	11.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5.	2.	3.	09.	12.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5.	2.	3.	09.	13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las
5.	2.	3.	09.	14.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5.	2.	3.	09.	15.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5.	2.	3.	09.	16.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5.	2.	3.	09.	17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Besi
5.	2.	3.	09.	18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5.	2.	3.	09.	19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5.	2.	3.	09.	20.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip dan Feting
5.	2.	3.	10.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
5.	2.	3.	10.	01.	Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian
5.	2.	3.	10.	02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah
5.	2.	3.	10.	03.	Belanja Modal Pengadaan Hand Traktor
5.	2.	3.	10.	04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas
5.	2.	3.	10.	05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lebah Madu
5.	2.	3.	10.	06.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengolahan Tanah
5.	2.	3.	10.	07.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pasca Panen
5.	2.	3.	10.	08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pembasmi Hama dan Penyakit
5.	2.	3.	10.	09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5.	2.	3.	10.	10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil
5.	2.	3.	10.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Prosesing
5.	2.	3.	10.	12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Peternakan
5.	2.	3.	10.	13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perikanan
5.	2.	3.	11.		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.	2.	3.	11.	01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
5.	2.	3.	11.	02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
5.	2.	3.	11.	03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Stensil
5.	2.	3.	11.	04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
5.	2.	3.	11.	05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
5.	2.	3.	11.	06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
5.	2.	3.	11.	07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
5.	2.	3.	11.	08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
5.	2.	3.	11.	09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
5.	2.	3.	11.	10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.	2.	3.	11.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
5.	2.	3.	12.		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.	2.	3.	12.	01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
5.	2.	3.	12.	02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku
5.	2.	3.	12.	03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	12.	04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5.	2.	3.	12.	05.	Belanja Modal Pengadaan White Board
5.	2.	3.	12.	06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu
5.	2.	3.	12.	07.	Belanja Modal Pengadaan Karpas
5.	2.	3.	12.	08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja
5.	2.	3.	12.	09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga
5.	2.	3.	12.	10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi
5.	2.	3.	12.	11.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner
5.	2.	3.	12.	12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor
5.	2.	3.	12.	13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.	2.	3.	12.	14.	Belanja Modal Pengadaan AC
5.	2.	3.	12.	15.	Belanja Modal Pengadaan TV
5.	2.	3.	12.	16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
5.	2.	3.	12.	17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai
5.	2.	3.	12.	18.	Belanja Modal Pengadaan Bendera Umbul-umbul
5.	2.	3.	12.	19.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
5.	2.	3.	12.	20.	Belanja Modal Pengadaan Box Arsip
5.	2.	3.	12.	21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga
5.	2.	3.	12.	22.	Belanja Modal Pengadaan Freezer Chiller Sample
5.	2.	3.	12.	23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
5.	2.	3.	12.	24.	Belanja Modal Pengadaan Parabola
5.	2.	3.	12.	25.	Belanja Modal Pengadaan Kotak Pengaduan
5.	2.	3.	12.	26.	Belanja Modal Pengadaan Tenda
5.	2.	3.	12.	27.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
5.	2.	3.	12.	28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.	2.	3.	13.		Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.	2.	3.	13.	01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
5.	2.	3.	13.	02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO
5.	2.	3.	13.	03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop
5.	2.	3.	13.	04.	Belanja Modal Pengadaan Printer
5.	2.	3.	13.	05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner
5.	2.	3.	13.	06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
5.	2.	3.	13.	07.	Belanja Modal Pengadaan CPU
5.	2.	3.	13.	08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
5.	2.	3.	13.	09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
5.	2.	3.	13.	10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
5.	2.	3.	13.	11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi
5.	2.	3.	14.		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.	2.	3.	14.	01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.	2.	3.	14.	02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	14.	03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
5.	2.	3.	14.	04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.	2.	3.	14.	05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
5.	2.	3.	14.	06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
5.	2.	3.	14.	07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
5.	2.	3.	14.	08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa
5.	2.	3.	14.	09.	Belanja Modal Pengadaan Rak TV/Kembang
5.	2.	3.	14.	10.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah
5.	2.	3.	14.	11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah
5.	2.	3.	14.	12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.	2.	3.	14.	13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu
5.	2.	3.	14.	14.	Belanja Modal Pengadaan Bangku
5.	2.	3.	14.	15.	Belanja Modal Pengadaan Mimbar / Panggung
5.	2.	3.	14.	16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor
5.	2.	3.	14.	17.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah
5.	2.	3.	15.		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.	2.	3.	15.	01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
5.	2.	3.	15.	02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas / Kompor Minyak Tanah
5.	2.	3.	15.	03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
5.	2.	3.	15.	04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser
5.	2.	3.	15.	05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas
5.	2.	3.	15.	06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
5.	2.	3.	15.	07.	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau
5.	2.	3.	15.	08.	Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker
5.	2.	3.	15.	09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak
5.	2.	3.	15.	10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
5.	2.	3.	15.	11.	Belanja Modal Pengadaan Cool Box
5.	2.	3.	16.		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.	2.	3.	16.	01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
5.	2.	3.	16.	02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Jam Meja
5.	2.	3.	16.	03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur
5.	2.	3.	17.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.	2.	3.	17.	01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera
5.	2.	3.	17.	02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam
5.	2.	3.	17.	03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor
5.	2.	3.	17.	04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya
5.	2.	3.	17.	05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System
5.	2.	3.	17.	06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
5.	2.	3.	17.	07.	Belanja Modal Pembuatan Film

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	17.	08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen
5.	2.	3.	17.	09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Band / Alat Korps Musik
5.	2.	3.	17.	10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rekam
5.	2.	3.	17.	11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.	2.	3.	17.	12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5.	2.	3.	17.	13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio
5.	2.	3.	17.	14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak
5.	2.	3.	17.	15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Computing
5.	2.	3.	17.	16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5.	2.	3.	18.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.	2.	3.	18.	01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon
5.	2.	3.	18.	02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili
5.	2.	3.	18.	03.	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB
5.	2.	3.	18.	04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
5.	2.	3.	18.	05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF
5.	2.	3.	18.	06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF
5.	2.	3.	18.	07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi
5.	2.	3.	18.	08.	Belanja Modal Pengadaan Telepon Seluler
5.	2.	3.	18.	09.	Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman
5.	2.	3.	18.	10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.	2.	3.	18.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5.	2.	3.	19.		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.	2.	3.	19.	01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5.	2.	3.	19.	02.	Belanja Modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5.	2.	3.	19.	03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5.	2.	3.	19.	04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5.	2.	3.	19.	05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5.	2.	3.	19.	06.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5.	2.	3.	19.	07.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5.	2.	3.	19.	08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5.	2.	3.	19.	09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
5.	2.	3.	19.	10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5.	2.	3.	19.	11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5.	2.	3.	19.	12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5.	2.	3.	19.	13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5.	2.	3.	19.	14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5.	2.	3.	19.	15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5.	2.	3.	19.	16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5.	2.	3.	19.	17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5.	2.	3.	19.	18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5.	2.	3.	19.	19.	Belanja Modal Pengadaan Switcher Antena

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	19.	20.	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5.	2.	3.	19.	21.	Belanja Modal Pengadaan Feeder
5.	2.	3.	19.	22.	Belanja Modal Pengadaan Humidity Control
5.	2.	3.	19.	23.	Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment
5.	2.	3.	19.	24.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5.	2.	3.	20.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.	2.	3.	20.	01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan
5.	2.	3.	20.	02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite
5.	2.	3.	20.	03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi
5.	2.	3.	20.	04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
5.	2.	3.	20.	05.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi
5.	2.	3.	20.	06.	Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur
5.	2.	3.	20.	07.	Belanja Modal Pengadaan Barometer
5.	2.	3.	20.	08.	Belanja Modal Pengadaan Seismograph
5.	2.	3.	20.	09.	Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph
5.	2.	3.	20.	10.	Belanja Modal Pengadaan Termometer
5.	2.	3.	20.	11.	Belanja Modal Pengadaan Stopwatch
5.	2.	3.	20.	12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air
5.	2.	3.	20.	13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Dekteksi Ikan (Fish Finder)
5.	2.	3.	20.	14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Tinggi Muka Air (Automatic Water Level Recorder)
5.	2.	3.	20.	15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Curah Hujan
5.	2.	3.	20.	16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gizi (Antropometri)
5.	2.	3.	20.	17.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Listrik
5.	2.	3.	20.	18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Air
5.	2.	3.	20.	19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal
5.	2.	3.	20.	20.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5.	2.	3.	20.	21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5.	2.	3.	20.	22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain
5.	2.	3.	20.	23.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kalibrasi
5.	2.	3.	20.	24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Gelombang Elektronik (Oscilloscope)
5.	2.	3.	20.	25.	Belanja Modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5.	2.	3.	20.	26.	Belanja Modal Pengadaan Takaran Kering
5.	2.	3.	20.	27.	Belanja Modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5.	2.	3.	20.	28.	Belanja Modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5.	2.	3.	20.	29.	Belanja Modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5.	2.	3.	20.	30.	Belanja Modal Pengadaan Alat Survey
5.	2.	3.	21.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.	2.	3.	21.	01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
5.	2.	3.	21.	02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	21.	03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT
5.	2.	3.	21.	04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata
5.	2.	3.	21.	05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
5.	2.	3.	21.	06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak
5.	2.	3.	21.	07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.	2.	3.	21.	08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.	2.	3.	21.	09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
5.	2.	3.	21.	10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Neurologi
5.	2.	3.	21.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
5.	2.	3.	21.	12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan
5.	2.	3.	21.	13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi
5.	2.	3.	21.	14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Internis
5.	2.	3.	21.	15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Alas Kedokteran Pelayanan KB dan Keluarga Balita
5.	2.	3.	21.	16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Alas Kedokteran ICU
5.	2.	3.	21.	17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi
5.	2.	3.	21.	18.	Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set
5.	2.	3.	21.	19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5.	2.	3.	21.	20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Nuklir
5.	2.	3.	21.	21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran ICCU
5.	2.	3.	21.	22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gawat Darurat
5.	2.	3.	21.	23.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Jiwa
5.	2.	3.	21.	24.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rehabilitasi Medik
5.	2.	3.	22.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.	2.	3.	22.	01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi
5.	2.	3.	22.	02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
5.	2.	3.	22.	03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia/Hidro Kimia/ Kimia Air
5.	2.	3.	22.	04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian
5.	2.	3.	22.	05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan
5.	2.	3.	22.	06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perkebunan
5.	2.	3.	22.	07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan
5.	2.	3.	22.	08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa
5.	2.	3.	22.	09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan
5.	2.	3.	22.	10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5.	2.	3.	22.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pengujian
5.	2.	3.	22.	12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Microbiologi
5.	2.	3.	22.	13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Model/Hidrolika

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	22.	14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5.	2.	3.	22.	15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Aspal Cat dan Kimia
5.	2.	3.	23.		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.	2.	3.	23.	01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.	2.	3.	23.	02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
5.	2.	3.	23.	03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass
5.	2.	3.	23.	04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Tol
5.	2.	3.	23.	05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.	2.	3.	24.		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.	2.	3.	24.	01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung
5.	2.	3.	24.	02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Ponton
5.	2.	3.	24.	03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang
5.	2.	3.	24.	04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di atas Air
5.	2.	3.	24.	05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan
5.	2.	3.	24.	06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Pada Jalan Tol
5.	2.	3.	25.		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.	2.	3.	25.	01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
5.	2.	3.	25.	02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
5.	2.	3.	25.	03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
5.	2.	3.	25.	04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Bawah Tanah
5.	2.	3.	25.	05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
5.	2.	3.	25.	06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
5.	2.	3.	25.	07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
5.	2.	3.	25.	08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air
5.	2.	3.	25.	09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap/Tanggul
5.	2.	3.	25.	10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase
5.	2.	3.	25.	11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud/Bronjong
5.	2.	3.	25.	12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Abrasi
5.	2.	3.	25.	13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor
5.	2.	3.	25.	14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bak Penampungan
5.	2.	3.	25.	15.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5.	2.	3.	25.	16.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5.	2.	3.	25.	17.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5.	2.	3.	25.	18.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	25.	19.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5.	2.	3.	25.	20.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5.	2.	3.	25.	21.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5.	2.	3.	25.	22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5.	2.	3.	25.	23.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5.	2.	3.	25.	24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5.	2.	3.	25.	25.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5.	2.	3.	26.		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.	2.	3.	26.	01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
5.	2.	3.	26.	02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
5.	2.	3.	26.	03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Hutan Kota
5.	2.	3.	26.	04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya
5.	2.	3.	27.		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.	2.	3.	27.	01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik
5.	2.	3.	27.	02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
5.	2.	3.	28.		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
5.	2.	3.	28.	01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
5.	2.	3.	28.	02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Jabatan
5.	2.	3.	28.	03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Dinas
5.	2.	3.	28.	04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Gudang
5.	2.	3.	28.	05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Bersejarah
5.	2.	3.	28.	06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Monumen
5.	2.	3.	28.	07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tugu Peringatan
5.	2.	3.	28.	08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Rumah Sakit
5.	2.	3.	28.	09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Puskesmas
5.	2.	3.	28.	10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Perpustakaan
5.	2.	3.	28.	11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran
5.	2.	3.	28.	12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sekolah Dasar / Sederajat
5.	2.	3.	28.	13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung SMP / Sederajat
5.	2.	3.	28.	14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung SMU / Sederajat

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	28.	15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Pendidikan Tinggi
5.	2.	3.	28.	16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Pendidikan Luar Biasa
5.	2.	3.	28.	17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Diklat / Kursus
5.	2.	3.	28.	18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Panti Asuhan
5.	2.	3.	28.	19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Panti Jompo
5.	2.	3.	28.	20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara
5.	2.	3.	28.	21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Dermaga
5.	2.	3.	28.	22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Pelelangan Ikan
5.	2.	3.	28.	23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Pasar
5.	2.	3.	28.	23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Perdagangan
5.	2.	3.	28.	25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman
5.	2.	3.	28.	26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat
5.	2.	3.	28.	27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Tempat Ibadah
5.	2.	3.	28.	28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga
5.	2.	3.	28.	29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Mess / Wisma / Losmen / Bungalow / Tempat Peristirahatan / Hotel
5.	2.	3.	28.	30.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Asrama
5.	2.	3.	28.	31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Industri
5.	2.	3.	28.	32.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Halte
5.	2.	3.	28.	33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pos Jaga / Pos Ronda
5.	2.	3.	28.	34.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Rumah / Perumahan
5.	2.	3.	28.	35.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Sarana Umum / Sosial
5.	2.	3.	28.	36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Biogas
5.	2.	3.	28.	37.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan PLTS
5.	2.	3.	28.	38.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Peternakan

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	28.	39.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lahan Parkir
5.	2.	3.	28.	40.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Budidaya Perikanan
5.	2.	3.	28.	41.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Instalasi
5.	2.	3.	28.	42.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Laboratorium
5.	2.	3.	28.	43.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Oceanarium / Opservatorium
5.	2.	3.	28.	44.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Garasi / Pool
5.	2.	3.	28.	45.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5.	2.	3.	28.	46.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Kandang Hewan / Ternak
5.	2.	3.	28.	47.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Museum
5.	2.	3.	28.	48.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pengujian Kelaikan
5.	2.	3.	28.	49.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
5.	2.	3.	28.	50.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Rumah Tahanan
5.	2.	3.	28.	51.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Kramatorium
5.	2.	3.	28.	52.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5.	2.	3.	28.	53.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Flat / Rumah Susun
5.	2.	3.	28.	54.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Menara
5.	2.	3.	28.	55.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lantai Jemur
5.	2.	3.	29.		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.	2.	3.	29.	01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
5.	2.	3.	29.	02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
5.	2.	3.	29.	03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
5.	2.	3.	29.	04.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
5.	2.	3.	29.	05.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
5.	2.	3.	29.	06.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
5.	2.	3.	29.	07.	Belanja Modal Pengadaan Buku Astronomi
5.	2.	3.	29.	08.	Belanja Modal Pengadaan Buku Arkeologi
5.	2.	3.	29.	09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	29.	10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
5.	2.	3.	29.	11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
5.	2.	3.	29.	12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya
5.	2.	3.	29.	13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.	2.	3.	29.	14.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
5.	2.	3.	29.	15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
5.	2.	3.	29.	16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5.	2.	3.	29.	17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5.	2.	3.	29.	18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa
5.	2.	3.	29.	19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan
5.	2.	3.	29.	20.	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan
5.	2.	3.	29.	21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan
5.	2.	3.	29.	22.	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)
5.	2.	3.	29.	23.	Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm
5.	2.	3.	29.	24.	Belanja Modal Pengadaan Peta / Atlas / Globe
5.	2.	3.	29.	25.	Belanja Modal Pengadaan Buku Laboratorium
5.	2.	3.	29.	26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan
5.	2.	3.	29.	27.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Deposit
5.	2.	3.	29.	28.	Belanja Modal Pengadaan Buku DDC (Dewey Decimal Classification)
5.	2.	3.	29.	29.	Belanja Modal Pengadaan Buku Tajuk Subjek
5.	2.	3.	29.	30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum
5.	2.	3.	29.	31.	Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat
5.	2.	3.	29.	32.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5.	2.	3.	29.	33.	Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5.	2.	3.	29.	34.	Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan
5.	2.	3.	29.	35.	Belanja Modal Pengadaan Buku Musik
5.	2.	3.	29.	36.	Belanja Modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5.	2.	3.	29.	37.	Belanja Modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
5.	2.	3.	29.	38.	Belanja Modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5.	2.	3.	29.	39.	Belanja Modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
5.	2.	3.	29.	40.	Belanja Modal Pengadaan Rekaman Suara
5.	2.	3.	29.	41.	Belanja Modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5.	2.	3.	29.	42.	Belanja Modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5.	2.	3.	29.	43.	Belanja Modal Pengadaan Tarscalt
5.	2.	3.	30.		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.	2.	3.	30.	01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto
5.	2.	3.	30.	02.	Belanja Modal Pengadaan Patung
5.	2.	3.	30.	03.	Belanja Modal Pengadaan Ukiran
5.	2.	3.	30.	04.	Belanja Modal Pengadaan Pahatan
5.	2.	3.	30.	05.	Belanja Modal Pengadaan Batu Alam
5.	2.	3.	30.	06.	Belanja Modal Pengadaan Maket / Miniatur / Diorama

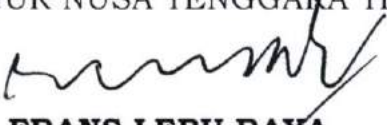
KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
5.	2.	3.	30.	07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik Tradisional
5.	2.	3.	30.	08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan Edukatif
5.	2.	3.	30.	09.	Belanja Modal Pengadaan Lembar Batik Penyuluhan
5.	2.	3.	30.	10.	Belanja Modal Pengadaan Benda Koleksi Museum
5.	2.	3.	30.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
5.	2.	3.	30.	12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga
5.	2.	3.	30.	13.	Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5.	2.	3.	30.	14.	Belanja Modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5.	2.	3.	30.	15.	Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan
5.	2.	3.	31.		Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.	2.	3.	31.	01.	Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5.	2.	3.	31.	02.	Belanja Modal Pengadaan Ternak
5.	2.	3.	31.	03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5.	2.	3.	31.	04.	Belanja Modal Pengadaan Binatang Unggas
5.	2.	3.	31.	05.	Belanja Modal Pengadaan Binatang Melata
5.	2.	3.	31.	06.	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ikan
5.	2.	3.	31.	07.	Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5.	2.	3.	31.	08.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5.	2.	3.	31.	09.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5.	2.	3.	31.	10.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5.	2.	3.	31.	11.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias
5.	2.	3.	31.	12.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5.	2.	3.	32.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5.	2.	3.	32.	01.	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
5.	2.	3.	32.	02.	Belanja Modal Pengadaan Radar
5.	2.	3.	32.	03.	Belanja Modal Pengadaan Mobil Water Canon
5.	2.	3.	32.	04.	Belanja Modal Pengadaan Borgol
5.	2.	3.	32.	05.	Belanja Modal Pengadaan Sangkur / Bayonet
5.	2.	3.	32.	06.	Belanja Modal Pengadaan Perisai / Tameng
5.	2.	3.	32.	07.	Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam
5.	2.	3.	32.	08.	Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru
5.	2.	3.	32.	09.	Belanja Modal Pengadaan Pentungan
5.	2.	3.	32.	10.	Belanja Modal Pengadaan Helm
5.	2.	3.	32.	11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm / Sirene
5.	2.	3.	32.	12.	Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter
5.	2.	3.	32.	13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Senjata Tajam Keamanan / Kebakaran
5.	2.	3.	32.	14.	Belanja Modal Pengadaan Teropong
5.	2.	3.	32.	15.	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5.	2.	3.	32.	16.	Belanja Modal Pengadaan Amunisi
5.	2.	3.	32.	17.	Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar

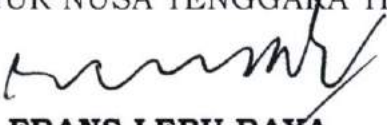
KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	33.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
5.	2.	3.	33.	01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran
5.	2.	3.	34.		Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pengamanan Jalan
5.	2.	3.	34.	01.	Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan
5.	2.	3.	34.	02.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pembatas Jalan
5.	2.	3.	34.	03.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat
5.	2.	3.	34.	04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Pengatur Lalu Lintas Darat
5.	2.	3.	34.	05.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Timbang
5.	2.	3.	34.	06.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Udara
5.	2.	3.	34.	07.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Laut
5.	2.	3.	35.		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan
5.	2.	3.	35.	01.	Belanja Modal Jaringan SAMSAT On - Line
5.	2.	3.	35.	02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Gas
5.	2.	3.	35.	03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet
5.	2.	3.	35.	04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5.	2.	3.	35.	05.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5.	2.	3.	35.	06.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5.	2.	3.	35.	07.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5.	2.	3.	35.	08.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5.	2.	3.	35.	09.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5.	2.	3.	36.		Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah
5.	2.	3.	36.	01.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5.	2.	3.	36.	02.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5.	2.	3.	36.	03.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5.	2.	3.	36.	04.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5.	2.	3.	36.	05.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5.	2.	3.	36.	06.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5.	2.	3.	36.	07.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPS
5.	2.	3.	36.	08.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5.	2.	3.	36.	09.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5.	2.	3.	36.	10.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5.	2.	3.	36.	11.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5.	2.	3.	36.	12.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
5.	2.	3.	36.	13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
5.	2.	3.	37.		Belanja Modal BLUD
5.	2.	3.	37.	01.	Belanja Modal BLUD.

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
5.	2.	3.	38.		
5.	2.	3.	38.		Belanja Modal Dana BOS
5.	2.	3.	38.	01.	Belanja Modal Dana BOS SMA
5.	2.	3.	38.	02.	Belanja Modal Dana BOS SMK
5.	2.	3.	38.	03.	Belanja Modal Dana BOS SLB

Keterangan :

- 1) Digunakan untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2) Hanya untuk Belanja Pimpinan Anggota DPRD
- 3) Belanja Hibah kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa di luar wilayah Provinsi atau kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi pemberi hibah

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



 FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV. : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

KODE AKUN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
6.					PEMBIAYAAN DAERAH
6.	1.				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.	1.	1.			SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
6.	1.	1.	01.		Pelampauan penerimaan PAD
6.	1.	1.	01.	01.	Pajak Daerah
6.	1.	1.	01.	02.	Retribusi Daerah
6.	1.	1.	01.	03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.	1.	1.	01.	04.	Lain-Lain PAD yang Sah
6.	1.	1.	02.		Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.	1.	1.	02.	01.	Bagi Hasil Pajak
6.	1.	1.	02.	02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.	1.	1.	02.	03.	Dana Alokasi Umum
6.	1.	1.	02.	04.	Dana Alokasi Khusus
6.	1.	1.	03.		Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.	1.	1.	03.	01.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
6.	1.	1.	03.	02.	Penerimaan dari Pendapatan Hibah
6.	1.	1.	04.		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6.	1.	1.	04.	01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6.	1.	1.	04.	02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.	1.	1.	04.	03.	Belanja Barang dan Jasa
6.	1.	1.	04.	04.	Belanja Modal
6.	1.	1.	04.	05.	Belanja Bunga
6.	1.	1.	04.	06.	Belanja Subsidi
6.	1.	1.	04.	07.	Belanja Hibah
6.	1.	1.	04.	08.	Belanja Bantuan Sosial
6.	1.	1.	04.	09.	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.	1.	1.	04.	10.	Belanja Bantuan Keuangan
6.	1.	1.	04.	11.	Belanja Belanja Tidak Terduga

f

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
6.	1.	1.	05.		Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6.	1.	1.	05.	01.	Uang jaminan
6.	1.	1.	05.	02.	Potongan Taspen
6.	1.	1.	05.	03.	Potongan Beras
6.	1.	1.	05.	04.	Askes
6.	1.	1.	06.		Sisa Belanja DAK
6.	1.	1.	06.	01.	DAK Bidang Pendidikan
6.	1.	1.	06.	02.	DAK Bidang Kesehatan
6.	1.	1.	06.	03.	DAK bidang Infrastruktur
6.	1.	1.	06.	04.	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
6.	1.	1.	06.	05.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
6.	1.	1.	06.	06.	DAK Bidang Pertanian
6.	1.	1.	06.	07.	DAK Bidang Lingkungan Hidup
6.	1.	1.	06.	08.	DAK Bidang Kehutanan
6.	1.	1.	06.	09.	DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal
6.	1.	1.	06.	10.	DAK Bidang Perdagangan
6.	1.	1.	06.	11.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
6.	1.	1.	07.		Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
6.	1.	1.	07.	01.	Dana Bagi Hasil PBB
6.	1.	1.	07.	02.	Dana Bagi Hasil PPh
6.	1.	1.	07.	03.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau
6.	1.	1.	08.		Pelampauan /(Pengurangan) Penerimaan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Lalu
6.	1.	1.	08.	01.	Pelampauan/Pengurangan Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.	1.	1.	08.	02.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Lalu
6.	1.	2.			PENCAIRAN DANA CADANGAN
6.	1.	2.	01.		Pencairan Dana Cadangan
6.	1.	2.	01.	01.	Pencairan Dana Cadangan.
6.	1.	3.			HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
6.	1.	3.	01.		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN
6.	1.	3.	01.	01.	BUMD.....
6.	1.	3.	02.		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6.	1.	3.	02.	01.	BUMD.....

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
6.	1.	3.	03.		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Milik Swasta
6.	1.	3.	03.	01.	Perusahaan...
6.	1.	3.	04.		Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
6.	1.	3.	04.	01.	Hasil Penjualan Aset.
6.	1.	4.			PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
6.	1.	4.	01.		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.	1.	4.	01.	01.	Penerusan Pinjaman.....
6.	1.	4.	02.		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6.	1.	4.	02.	01.	Pemerintah Daerah
6.	1.	4.	03.		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6.	1.	4.	03.	01.	Bank
6.	1.	4.	04.		Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan Bukan Bank
6.	1.	4.	04.	01.	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.	1.	4.	05.		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
6.	1.	4.	05.	01.	Obligasi Atas Nama..
6.	1.	4.	05.	02.	Obligasi Nomor.....
6.	1.	5.			PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN
6.	1.	5.	01.		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
6.	1.	5.	01.	01.	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan.
6.	1.	5.	02.		Penarikan Dana Bergulir
6.	1.	5.	02.	01.	Penarikan dari Dana Bergulir TKI
6.	1.	5.	03.		Pencairan Deposito Jangka Panjang
6.	1.	5.	03.	01.	Pencairan Deposito Jangka Panjang.
6.	1.	5.	04.		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
6.	1.	5.	04.	01.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Dua
6.	1.	5.	04.	02.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Empat
6.	1.	5.	04.	03.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada Kelompok Masyarakat (Koperasi)
6.	1.	5.	04.	04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen LUEP (Pertanian, Peternakan dan BKP2)

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
6.	1.	6.			PENERIMAAN PIUTANG DAERAH
6.	1.	6.	01.		Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah
6.	1.	6.	01.	01.	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Pajak Daerah
6.	1.	6.	01.	02.	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Retribusi Daerah
6.	1.	6.	01.	03.	Penerimaan Piutang Daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah
6.	1.	6.	02.		Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah
6.	1.	6.	02.	01.	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
6.	1.	6.	03.		Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6.	1.	6.	03.	01.	Pemerintah Daerah
6.	1.	6.	04.		Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6.	1.	6.	04.	01.	Bank
6.	1.	6.	05.		Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.	1.	6.	05.	01.	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.	1.	7.			PENERIMAAN DARI SELISIH BAYAR
6.	1.	7.	01.		Penerimaan dari Selisih Bayar Kas Daerah
6.	1.	7.	01.	01.	Penerimaan dari Selisih Bayar Kas Daerah.
6.	2.				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.	2.	1.			PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
6.	2.	1.	01.		Pembentukan Dana Cadangan
6.	2.	1.	01.	01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.	2.	2.			PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
6.	2.	2.	01.		Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)
6.	2.	2.	01.	01.	Penyertaan Modal kepada
6.	2.	2.	02.		Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6.	2.	2.	02.	01.	PT. Flobamor
6.	2.	2.	02.	02.	BANK NTT
6.	2.	2.	02.	03.	PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT
6.	2.	2.	02.	04.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
6.	2.	2.	03.		Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Swasta
6.	2.	2.	03.	01.	PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	
6.	2.	2.	04.		Pembentukan Dana Bergulir
6.	2.	2.	04.	01.	Pembentukan Dana Bergulir.
6.	2.	2.	05.		Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
6.	2.	2.	05.	01.	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan.
6.	2.	2.	06.		Pembentukan Deposito Jangka Panjang
6.	2.	2.	06.	01.	Pembentukan Deposito Jangka Panjang.
6.	2.	2.	07.		Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
6.	2.	2.	07.	01.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Roda Dua
6.	2.	2.	07.	02.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Roda Empat
6.	2.	2.	07.	03.	Pengeluaran Investasi Non Permanen kepada Kelompok Masyarakat (Koperasi)
6.	2.	2.	07.	04.	Pengeluaran Investasi Non Permanen LUEP (Pertanian, Peternakan dan BKP2)
6.	2.	3.			PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN
6.	2.	3.	01.		Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.	2.	3.	01.	01.	Penerusan Pinjaman (SLA)
6.	2.	3.	01.	02.	Rekening Dana Investasi (RDI)
6.	2.	3.	02.		Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain
6.	2.	3.	02.	01.	Pemerintah Daerah
6.	2.	3.	03.		Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
6.	2.	3.	03.	01.	Bank BRI
6.	2.	3.	04.		Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
6.	2.	3.	04.	01.	Lembaga Keuangan bukan Bank
6.	2.	3.	05.		Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.	2.	3.	05.	01.	Penerusan Pinjaman...
6.	2.	3.	06.		Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain
6.	2.	3.	06.	01.	Pemerintah Daerah....

KODE					URAIAN
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	
6.	2.	3.	07.		Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
6.	2.	3.	07.	01.	Bank
6.	2.	3.	08.		Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
6.	2.	3.	08.	01.	Lembaga Keuangan bukan Bank...
6.	2.	3.	09.		Pelunasan Obligasi Daerah pada Saat Jatuh Tempo
6.	2.	3.	09.	01.	Obligasi Atas Nama
6.	2.	3.	09.	02.	Obligasi Nomor.....
6.	2.	3.	10.		Pembelian kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo
6.	2.	3.	10.	01.	Obligasi atas Nama
6.	2.	3.	10.	02.	Obligasi Nomor....
6.	2.	4.			PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
6.	2.	4.	01.		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6.	2.	4.	01.	01.	Pemerintah
6.	2.	4.	02.		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain
6.	2.	4.	02.	01.	Pemerintah Daerah ...
6.	2.	4.	03.		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
6.	2.	4.	03.	01.	BUMN...
6.	2.	4.	04.		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
6.	2.	4.	04.	01.	BUMD...
6.	2.	5.			PENGELUARAN DARI SELISIH BAYAR
6.	2.	5.	01.		Pengeluaran dari Selisih Bayar Kas Daerah
6.	2.	5.	01.	01.	Pengeluaran dari Selisih Bayar Kas Daerah.

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

FRANS LEBU RAYA